

**UPAYA UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM  
MENANGANI MASALAH PERNIKAHAN ANAK DI BANGLADESH TAHUN  
2016-2019**

**Oleh: Regina Elisha Hutabarat**

**Email: [Elisharegina9@gmail.com](mailto:Elisharegina9@gmail.com)**

**Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA**

Bibliografi: 9 Buku, 10 Jurnal, 19 Situs Web, 4 Berita, 19 Data Primer

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. (0761) – 63277, 23430

***Abstract***

*This research is done to understand how a group, in this case UNICEF, involves in ending child marriage in Bangladesh. Bangladesh is one of the highest rate of child marriage country in the world, influenced by poverty and lack of education. Child marriage is followed by some big risks, young pregnancy, abuse at home, lost access of education, and abandoned by society because of social pressure. Child marriage especially happens to girl that is seen as burden n the family, because they can not do hard job.*

*This research is based on international organisation theory, in group level analysis to understand the role of one group to another in certain issue. The datas are collected by using qualitative methodology, most of the datas are published by official website of UNICEF, UNFPA, and Bangladesh government, books, and journals that talking about child marriage in Bangladesh.*

*The result of this research showed that UNICEF is trying to end child marriage in Bangladesh in so many ways, including to work along with the government of Bangladesh in the making of National Action Plan to end child marriage in Bangladesh through identification, exploration, data collecting, and NAP as the result. UNICEf also work together with UNFPA in global programme to end child marriage, the result of this programme are social programmes, the making of Kishori Centre, the existence of gender promoters to increase public awareness of gender equality, social support, and public service to end child marriage in Bangadesh.*

***Keywords: UNICEF, Bangladesh, child marriage, UNFPA, gender equality***

## PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan tindakan ilegal di Bangladesh sejak tahun 1929, dimana usia minimum untuk menikah yang telah ditetapkan adalah 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria.<sup>1</sup> Meski demikian, Bangladesh justru menduduki peringkat kedua di dunia dalam hal pernikahan anak di bawah usia 15 tahun, dengan persentase mencapai angka 32 persen. Bangladesh menempati posisi sebagai negara tertinggi ketiga (66 persen) dalam kasus pernikahan anak di bawah usia 18 tahun, posisi ini hanya kalah dari Niger dan Chad. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pernikahan anak ini merupakan permasalahan yang sangat serius yang harus dihadapi pemerintah Bangladesh.

Penghapusan pernikahan anak adalah prioritas pembangunan utama dan target dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus pernikahan anak pada tahun 2030. Pada tanggal 15 Maret 2016, UNICEF bekerja sama dengan UNFPA meluncurkan *Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage* (GPECM), yang dilaksanakan dalam tiga fase selama 15 tahun. Ini adalah program pertama yang dipimpin oleh PBB yang dirancang untuk mengurangi tingkat pernikahan anak dalam skala besar.<sup>2</sup> GPECM adalah rencana ambisius dan kompleks yang

tahap awal akan direalisasikan di 12 negara dengan prevalensi paling tinggi: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen and Zambia. Dalam hal pendanaan, alokasi bantuan dari UNICEF untuk Bangladesh merupakan yang tertinggi dibandingkan 11 negara lainnya, walaupun secara akumulatif angkanya masih sedikit di bawah India (US\$2.963.000).<sup>3</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pernikahan anak di Bangladesh merupakan misi yang masih jauh dari kata tuntas, karenanya butuh upaya komprehensif dan multisektor agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud pada tahun 2030. Oleh karena itulah, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **“Upaya UNICEF dalam Menangani Masalah Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun 2016-2019”**

## KERANGKA TEORI

### a. Perspektif Pluralisme

Berbeda dengan paham tradisional –realisme— yang melihat negara sebagai aktor rasional, pluralisme justru memandang negara bukan aktor rasional. Pluralis melihat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari perselisihan, tawar-menawar, dan kompromi diantara berbagai aktor yang berbeda, sehingga mengurangi optimalisasi tujuan yang

---

<sup>1</sup> Human Rights Watch, “Bangladesh: Girls Damaged by Child Marriage,” <https://www.hrw.org/news/2015/06/09/bangladesh-girls-damaged-child-marriage> (diakses pada 20 Januari 2021).

<sup>2</sup> International Center for Research on Women, (2013b), *Op.cit* hlm. 2.

---

<sup>3</sup> UNICEF, (2021), “ UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage,” <https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage> (diakses pada 24 Januari 2021).

ingin dicapai. Terakhir, pluralisme tidak hanya memfokuskan kajiannya pada isu keamanan tradisional saja namun juga keamanan non tradisional diantaranya mengenai isu sosial, ekonomi, dan masalah lingkungan. Penganut pluralis menolak dominasi isu militer dan keamanan tradisional dalam hubungan internasional. Mereka meyakini bahwa HI memiliki agenda yang sangat luas dan bervariasi.<sup>4</sup>

Sama halnya dengan tulisan ini, penulis juga menekankan bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapat menyelesaikan permasalahan pernikahan anak di Bangladesh, karena praktiknya pemerintah tidak cukup berhasil untuk menuntaskan permasalahan yang berlangsung turun temurun ini. Karena itulah, penulis kemudian melihat bagaimana upaya organisasi internasional, dalam hal ini adalah UNICEF, untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan anak disana. Lebih jauh, penulis juga membahas isu keamanan non tradisional disini (yaitu isu sosial), yang juga menjadi perhatian utama bagi penganut.

#### **b. Tingkat Analisa Kelompok**

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa kelompok untuk menjelaskan keterlibatan kelompok tertentu yang berkaitan langsung dengan perumusan kebijakan luar negeri. Adanya tekanan dari kelompok ini menjadi pertimbangan dalam proses kebijakan luar negeri, sehingga menjadi sorotan merespon dinamika politik. Kelompok ini dapat terdiri dari elit

politik, kelompok birokrasi, *pressure group* dan individu dominan.<sup>5</sup>

#### **c. Teori Peran Organisasi Internasional**

Penulis menggunakan teori peran Organisasi Internasional dalam penelitian ini. Organisasi internasional (OI) menurut Clive Archer adalah struktur formal yang berkesinambungan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara anggota-anggotanya, dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.

Selanjutnya, OI dapat dibedakan lagi berdasarkan tujuan dan aktivitasnya, ada yang menuju pada hubungan kerjasama para anggotanya, menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antar anggota. Dan yang terakhir adalah klasifikasi OI berdasarkan strukturnya, sehingga dapat dilihat bagaimana suatu OI memperlakukan anggotanya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat kemandirian institusi dari anggotanya yang berupa pemerintahan dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan.<sup>6</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Keterlibatan UNICEF di Bangladesh Terkait Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, berkomitmen untuk**

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

---

<sup>5</sup> J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, 14 (1), 1961, hlm. 77-92

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 63-64.

mengakhiri pernikahan anak di bawah usia 15 tahun di tahun 2021 dan dilanjutkan dengan mengakhiri pernikahan anak di bawah usia 18 tahun untuk semua anak perempuan di tahun 2041.<sup>7</sup> Hal ini dituangkan ke dalam *National Action Plan* pertama di Bangladesh dalam upaya mengakhiri pernikahan anak yang menjadi fokus politik pemerintahan Bangladesh, pembuatan NAP ini dibantu oleh UNICEF untuk memahami situasi dan kondisi pernikahan anak secara nasional di Bangladesh. Situasi pernikahan anak di Bangladesh pada saat ini menempati peringkat ke-4 perempuan dengan usia muda yang melahirkan anak di dunia, dengan jumlah pernikahan anak perempuan di bawah usia 18 tahun sebesar 3, 8 juta.<sup>8</sup>

Dalam pembuatan *National Action Plan* tersebut, pemerintah Bangladesh dibantu oleh UNICEF untuk menganalisis, mengalokasi dana, dan pembentukan metodologi program. Hasil Kerjasama tersebut adalah 57 proyek dan 7 program pengembangan yang berkaitan dengan upaya mengakhiri pernikahan anak di Bangladesh, semua proyek dan program tersebut disarankan untuk dilakukan dalam beberapa tahapan yang sudah dianalisis bersama UNICEF, yaitu identifikasi, eksplorasi, pengumpulan data, dan pengakuan NAP.

Setiap penanganan kasus pernikahan anak harus diawali dengan identifikasi korban, terutama untuk mengenali anak perempuan dengan risiko tinggi untuk menjadi korban

pernikahan anak, sebab anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki risiko lebih besar untuk mengalami masalah kesehatan seksual.<sup>9</sup>

Kemudian, Kasus pernikahan anak melibatkan banyak aspek yang luas dalam penyelesaiannya, oleh karena itu semua kementerian didalam pemeritahan Bangladesh dilibatkan dalam upaya mengakhiri pernikahan anak, setiap proyek, program, dan operasi yang berkaitan dengan kasus pernikahan anak akan dieksplorasi secara luas untuk kemudian dapat dicegah dari berbagai aspek sosial dan politik di dalam pemerintahan Bangladesh. Sebab mayoritas pernikahan anak di Bangladesh terjadi karena permasalahan ekonomi yang membuat keluarga berupaya mengurangi beban finansial dengan menikahkan anak perempuan mereka dan mendapatkan dowry sebagai bayaran.<sup>10</sup>

Pengumpulan informasi dan data valid terkait kasus pernikahan anak secara nasional di Bangladesh untuk mengawasi situasi pernikahan anak. Data tersebut kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan mekanisme penyelesaian masalah paling efektif dan efisien dalam mengakhiri pernikahan anak. Hasil dari pengumpulan data terkait pernikahan anak dari tahun 2013-2019 yang kemudian dianalisis menghasilkan informasi global mengenai pernikahan anak, menunjukkan bahwa publikasi terbesar mengenai pernikahan anak terjadi pada tahun 2016,2017, dan 2018, dengan mayoritas publikasi melakukan

---

<sup>7</sup> UNICEF, "Scoping Analysis of National Budget Allocation for Ending Child Marriage in Bangladesh," 2017, [www.Unicef.org.bd](http://www.Unicef.org.bd) (diakses pada 12 September 2021).

<sup>8</sup> *Ibid.*

---

<sup>9</sup> UNICEF, "Gender Action Plan 2014-2017."

<sup>10</sup> Rife Kalamar dan Hindin, "A Review of Impact Evaluations of Intervention Aimed at Child Marriage," 2016.

pendekatan dari sudut pandang hak asasi manusia, kesehatan anak, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan anak muda.<sup>11</sup>

Setelah beberapa tahapan sebelumnya dilakukan, maka dilakukan pengajuan untuk menjadi NAP dalam mengakhiri pernikahan anak, proses ini membuat setiap bagian dari NAP adalah hasil dari analisis dan pertimbangan yang benar-benar memiliki dampak terhadap masyarakat. Setelah menjadi NAP maka dilakukan analisis lebih jauh untuk menentukan alokasi dana dan sumber dana untuk mengakhiri pernikahan anak.

**b. *Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage (GPECM) UNICEF-UNFPA***

Bangladesh merupakan salah satu dari 12 negara<sup>12</sup> yang menjadi target program global UNICEF untuk mengakhiri pernikahan anak, bekerja sama dengan UNFPA dan Kementerian Perempuan dan Anak di Bangladesh, program ini bertujuan untuk memastikan anak perempuan bebas menikmati waktu mereka tanpa perlu dibayangi oleh pernikahan yang tidak mereka inginkan, merasakan transisi kehidupan yang sehat dan aman, dan bisa menentukan sendiri pilihan yang akan mereka ambil dalam kehidupan

Program Global ini bergantung pada pengaruh dari infrastruktur yang sudah tersedia untuk membangun kapasitas partner regional, meningkatkan komitmen pemerintah

dan menargetkan semua komunitas untuk melakukan perubahan dalam menghadapi kebiasaan pernikahan anak. Dalam hal ini, UNFPA dan UNICEF mengadopsi beberapa dasar hak asasi manusia untuk mengaplikasikan kesetaraan gender.<sup>13</sup>

Pada tahun 2016, dilakukan program perlindungan sosial nasional, dimana pemerintah Bangladesh bekerja sama dengan kantor nasional untuk menginvestasikan Proyek Pemberdayaan Remaja yang dibawa oleh Program Global UNICEF. Proyek ini dilakukan di daerah, bertujuan untuk menciptakan lingkungan dengan komunitas yang mendukung pencegahan pernikahan anak. Program ini memobilisasi komunitas untuk menyebarkan informasi dan memberikan bantuan kepada orang tua dan anggota komunitas terkait aktivitas yang dilakukan, yaitu penyediaan *safe space* untuk anak perempuan, dukungan pendidikan (literasi dasar dan komunikasi), pelatihan kompetensi sosial (kemampuan untuk bertahan hidup sehari-hari dan pendidikan seksual).<sup>14</sup> Pada akhir tahun 2016, hampir 150.000 perempuan menerima proyek pemberdayaan perempuan di Bangladesh, dengan pemerintah Bangladesh sepakat untuk menyebarkan 5.000 proyek pemberdayaan baru secara nasional menggunakan dana sendiri, dengan berkaca pada proyek

---

<sup>11</sup> Siddiqi, Manahil, dan Margaret E. Greene, “Mapping the Field: A Systematic Scoping Study of Child marriage Research, 2000-2019,” Washington D.C: Greene Works.

<sup>12</sup> Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen and Zambia.

---

<sup>13</sup> UNFPA-UNICEF, “Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage, Progress Report,” 2016, Juni 2017, hlm. 5, [www.unicef.org](http://www.unicef.org) (diakses pada 20 September 2021).

<sup>14</sup> Buchmann, N, “Power vs Money: Alternative Approaches to Reducing Child Marriage in Bangladesh, a Randomized Control Trial,” 2017, hlm. 6, [https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/100\\_child-marriage-bangladesh-Apr2017.pdf](https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/100_child-marriage-bangladesh-Apr2017.pdf) (diakses pada 20 September 2021).

pemberdayaan yang dikembangkan oleh UNICEF.<sup>15</sup>

Program Pendekatan Insentif Cash (penyediaan minyak goreng) merupakan program lain yang diberlakukan di Bangladesh untuk menekan angka pernikahan anak dan mendukung kehadiran anak di sekolah.<sup>16</sup>

*Kishori Resource Centres* adalah bentuk pelayanan terhadap anak perempuan dan terletak di 72 sekolah dasar di Bangladesh. Pusat Kishori dibuat untuk melihat perkembangan kesetaraan gender di Bangladesh dalam periode waktu yang signifikan, membutuhkan waktu selama 12 bulan untuk mengajarkan kurikulum *gender awareness* dan isu terkait budaya di Bangladesh, program ini sedang dalam masa pembekuan dikarenakan kehadiran Covid-19 sejak awal tahun 2020.<sup>17</sup>

### c. Kendala UNICEF dalam Membantu Bangladesh Menanggulangi Kasus Pernikahan Anak

Pemalsuan usia anak yang sering dilakukan oleh orang tua dan keluarga pengantin pasangan, dibantu oleh pegawai pencatat registrasi pernikahan yang disebut dengan *Kazi*, tindakan kriminal ini dilakukan *Kazi* juga dilatarbelakangi oleh rendahnya pendapatan mereka sehingga mencari berbagai cara lain untuk mendapatkan

pemasukan tambahan.<sup>18</sup> Kondisi perekonomian yang tidak stabil menjadi faktor umum munculnya berbagai tindakan kriminal, masyarakat yang tidak sejahtera akan melakukan tindakan ilegal demi dapat bertahan hidup. Hal yang ironis dari kasus ini adalah kenyataan bahwa anak perempuan dinikahkan karena orang tua tidak memiliki uang untuk membiayai kehidupan anak tersebut, namun orang tua memiliki cukup uang untuk membayar *Kazi* dan melakukan pemalsuan data agar anaknya dapat lulus registrasi pernikahan. Masyarakat tidak sadar dengan risiko pernikahan anak yang akan membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan sosial mereka, anak akan kehilangan kesempatan untuk berekspresi dan belajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri.<sup>19</sup> Kehilangan anak yang dapat belajar dan berkespresi, sama dengan kehilangan generasi dengan pondasi kuat untuk berkembang dan bersaing dengan perubahan zaman.

Stigma buruk masyarakat Bangladesh terhadap posisi perempuan di dalam struktur sosial berperan besar dalam mempertahankan praktik pernikahan anak, anak laki-laki dianggap memiliki nilai lebih tinggi daripada anak perempuan karena

<sup>15</sup> UNFPA-UNICEF, *Op.Cit.* hlm. 32.

<sup>16</sup> Iffat Idris, "Intervention to Reduce Forced Marriage," K4D (Knowledge, evidence, and learning for development), 15 November 2019, hlm. 4.

<sup>17</sup> Billah, Masuma, Eashita, Haque, Surojit Kundu, Saddam Hossain, Momoe Makino, dan Sajeda Amin, "Midline Report: Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh," Dhaka, Population Council, 2020, hlm. 7.

<sup>18</sup> Herz, B.K. dan G.B. Sperling, "What Works in Girls' Education: Evidence and Policies from the Developing World," Council on Foreign Relations, 2004, [https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=7a0W\\_bqvzA0C&oi=fnd&pg=PR5&dq=invest+on+girls+science+education&ots=UdGSuMkUVd&sig=eYM9Vf5w9MWHehQnIknJTMngDEQ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=7a0W_bqvzA0C&oi=fnd&pg=PR5&dq=invest+on+girls+science+education&ots=UdGSuMkUVd&sig=eYM9Vf5w9MWHehQnIknJTMngDEQ#v=onepage&q&f=false) (diakses pada 20 September 2021).

<sup>19</sup> Action Aid, "Education Action 25", 15 Agustus 2011, [http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/education\\_action\\_25\\_-\\_english\\_0.pdf](http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/education_action_25_-_english_0.pdf), (diakses pada 28 September 2021).

mereka dilihat sebagai sosok yang kuat dan mampu membantu orang tua dengan kemampuan fisik mereka, mengingat bahwa pendapatan utama masyarakat Bangladesh didapatkan dari sektor agrikultur.<sup>20</sup> Perempuan tidak dianggap bernilai karena mereka tidak cukup kuat untuk membantu orang tua dalam mencari pendapatan, mereka juga dianggap akan meninggalkan keluarga ketika mereka menikah. Oleh karena itu, banyak orang tua segera menikahkan anak perempuan mereka di usia muda untuk mempercepat proses anak perempuan meninggalkan rumah dan menjadi tanggung jawab suami mereka.

Anak perempuan yang mengalami pelecehan dianggap sebagai aib dalam keluarga sehingga ketika terjadi kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan, jalan yang diambil oleh keluarga perempuan adalah menikahkan anak tersebut sebelum usianya lebih tua dan tidak ada lagi yang menginginkannya sebagai pasangan. Untuk dapat menghapus stigma buruk seperti ini, pemerintah Bangladesh harus bekerja keras dalam waktu lama dan tanpa henti, sebab pendekatan yang mendadak dan masif akan cenderung direspon dengan penolakan oleh masyarakat yang pada umumnya memiliki informasi minim terkait bahaya dari pernikahan anak dan diskriminasi gender.

NGO bergerak secara independen untuk melawan pernikahan anak di Bangladesh, menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender dan bagaimana anak perempuan dan laki-laki adalah sama baiknya. Sebagai pihak yang bergerak sendiri, NGO membutuhkan dukungan pemerintah untuk dapat

mengimplementasikan kesetaraan gender di lingkungan sosial, namun pada kenyataannya, pemerintah tidak memberikan dukungan yang konsisten terhadap bantuan NGO. Sebagai contoh, pemerintah Bangladesh menurunkan usia minimal pernikahan untuk anak perempuan dengan izin orang tua, yaitu usia 16 tahun, hal ini akan mempersulit NGO dalam meyakinkan orang tua untuk tidak menikahkan anak mereka di usia muda ketika pemerintah bahkan memberikan mereka kekuasaan untuk menikahkan anak tersebut.<sup>21</sup> Permasalahan sesungguhnya tidak terletak pada izin orang tua, tapi apakah anak tersebut 'bersedia' untuk dinikahkan, sebab dalam kasus pernikahan anak di Bangladesh, orang tua menjadi pihak yang melepaskan tanggung jawab mereka terhadap anak dengan cara memaksa mereka untuk menikah dan meninggalkan rumah. Permasalahan demikian harus diatasi oleh pemerintah Bangladesh dengan bersikap konsisten dalam mengambil keputusan untuk mengakhiri pernikahan anak di negaranya.

## PENUTUP

Dalam membantu pemerintah Bangladesh mengakhiri masalah pernikahan anak, UNICEF juga berupaya melakukan beberapa program yang tergabung dalam *Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage in Bangladesh*, proyek ini terdiri atas banyak komponen program di dalam sektor pendidikan yang dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran anak-anak di sekolah. Program tersebut meliputi Proyek Pemberdayaan Remaja, program Pendekatan Insentif Cash (penyediaan

---

<sup>20</sup> Shamnaz Arifin, *Op.Cit*, hlm. 12.

---

<sup>21</sup> Shamnaz Arifin, *Op.Cit*, hlm. 13.

minyak goreng), *Kishori Resource Centres*, *Gender Promoters* (GPs), bantuan finansial, dan bantuan pelayanan publik dalam akses kesehatan, dukungan psikologi, *shelter*, dan hukum.

Program di atas dilakukan secara masif dan berkelanjutan di Bangladesh, program yang dikembangkan oleh UNICEF tersebut akan diadopsi oleh pemerintah Bangladesh untuk dimasukkan ke kurikulum pendidikan anak demi membentuk anak-anak yang berpendidikan dan mengetahui hak dan kesempatan mereka untuk berkembang sebagai makhluk sosial. Penyebaran informasi terkait kesetaraan gender, bahaya pernikahan anak, pendidikan seksual, kesempatan untuk mengekspresikan diri, kemampuan untuk berpendapat dan mengambil keputusan sendiri layaknya manusia yang memiliki hak.

Dalam menjalankan berbagai upaya untuk melawan aktivitas pernikahan anak, pemerintah Bangladesh juga bekerja sama dengan aktor lain, dalam hal ini adalah USAID, *World Vision*, dan *World Food Programme*, hal ini dilakukan sesuai dengan pemenuhan nilai-nilai perlindungan hak perempuan dan anak yang sudah diratifikasi Bangladesh di dunia internasional. Proyek yang digarap dalam kerja sama ini adalah proyek *Nobo Jatra* yang berarti '*New Beginning*' untuk anak-anak di Bangladesh, program ini berlangsung dalam waktu 12 bulan untuk melihat perkembangan kesadaran gender yang ada di lingkungan masyarakat setelah dilakukan pelatihan dan pengajaran terkait kesetaraan gender dan kemampuan dasar untuk bertahan hidup.

Terdapat kendala dan tantangan dalam upaya UNICEF dan pemerintahan Bangladesh untuk mengakhiri pernikahan anak, permasalahan utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan gender dan perlindungan anak terletak pada masalah internal pemerintahan Bangladesh yang tidak dapat diselesaikan dengan bantuan dari UNICEF, yaitu korupsi di dalam pemerintahan, *gender stereotype*, dan inkonsistensi pemerintah Bangladesh dalam membantu NGO melawan pernikahan anak. Untuk dapat menyelesaikan hal-hal tersebut, pemerintah Bangladesh harus dapat berkomitmen dan dengan aktif melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk mengakhiri pernikahan anak, di bawah wewenang pemerintahan.

Permasalahan pernikahan anak di Bangladesh menjadi pusat perhatian internasional sebab negara ini merupakan negara dengan tingkat pernikahan anak di bawah usia 15 tahun tertinggi di dunia. Tingginya tingkat pernikahan anak ini dipengaruhi oleh diskriminasi gender terhadap perempuan, pengaruh stigma sosial yang menempatkan perempuan di posisi rapuh dan tidak menguntungkan dalam struktur sosial, rendahnya pendidikan, dan kemiskinan. Menjadikan pernikahan anak sebagai tradisi berkelanjutan dari generasi ke generasi sebab anak-anak yang seharusnya membawa perubahan, dinikahkan sejak usia muda dan dipaksa untuk menjalani hidup yang sama dengan orangtua mereka.

## Referensi

- Action Aid, "Education Action 25", 15 Agustus 2011, [http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/education\\_action\\_25\\_-\\_english\\_0.pdf](http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/education_action_25_-_english_0.pdf), (diakses pada 28 September 2021)
- Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambique, Nepal, Niger, Sierra Leone,
- Billah, Masuma, Eashita, Haque, Surojit Kundu, Saddam Hossain, Momoe Makino, dan Sajeda Amin, "Midline Report: Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh," Dhaka, Population Council, 2020, hlm. 7.
- Buchmann. N, "Power vs Money: Alternative Approaches to Reducing Child Marriage in Bangladesh, a Randomized Control Trial," 2017, hlm. 6, <https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/100-child-marriage-bangladesh-Apr2017.pdf> (diakses pada 20 September 2021)
- Herz, B.K. dan G.B. Sperling, "*What Works in Girls' Education: Evidence and Policies from the Developing World*," Council on Foreign Relations, 2004, [https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=7a0W\\_bqvzA0C&oi=fnd&pg=PR5&dq=invest+on+girls+science+education&ots=UdGSuMkUVd&sig=eYM9Vf5w9MWHehQnIknJTMngDEQ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.nl/books?hl=en&lr=&id=7a0W_bqvzA0C&oi=fnd&pg=PR5&dq=invest+on+girls+science+education&ots=UdGSuMkUVd&sig=eYM9Vf5w9MWHehQnIknJTMngDEQ#v=onepage&q&f=false) (diakses pada 20 September 2021).
- Human Rights Watch, "Bangladesh: Girls Damaged by Child Marriage," <https://www.hrw.org/news/2015/06/09/bangladesh-girls-damaged-child-marriage> (diakses pada 20 Januari 2021).
- Iffat Idris, "Intervention to Reduce Forced Marriage," K4D (Knowledge, evidence, and learning for development), 15 November 2019, hlm. 4.
- International Center for Research on Women, (2013b), *Op.cit* hlm. 2.
- J. David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, 14 (1), 1961, hlm. 77-92
- Rife Kalamar dan Hindin, "A Review of Impact Evaluations of Intervention Aimed at Child Marriage," 2016.
- Siddiqi, Manahil, dan Margaret E. Greene, "Mapping the Field: A Systematic Scoping Study of Child marriage Research, 2000-2019," Washington D.C: Greene Works.
- UNFPA-UNICEF, "Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage, Progress Report," 2016, Juni 2017, hlm. 5, [www.unicef.org](http://www.unicef.org). (diakses pada 20 September 2021).
- UNICEF, "Gender Action Plan 2014-2017."
- UNICEF, "Scoping Analysis of National Budget Allocation for Ending Child Marriage in Bangladesh," 2017, [www.unicef.org.bd](http://www.unicef.org.bd) (diakses pada 12 September 2021).

UNICEF, (2021), “ UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage,” <https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-global-programme-end-child-marriage> (diakses pada 24 Januari 2021).